BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap praktik akuntansi yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Tuntutan tersebut terkait dengan akuntabilitas atas lembaga-lembaga pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas publik merupakan pemberian sebuah informasi dan juga pengungkapan atas aktivitas serta kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Bawono dan Novelsyah, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bentuk Akuntablilitas pemerintah terhadap masyarakat maka perlu disusun laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai cerminan apakah dalam suatu pemerintahan itu telah berjalan dengan baik atau belum.

Pemerintah daerah sebagai salah satu satuan kerja harus mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan yang disajikan harus mampu memberikan informasi keuangan yang berkualitas karena, laporan keuangan itu sendiri merupakan media bagi entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik dan juga memberikan informasi dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja kepemerintahan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip

tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Seiring dengan diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual maka dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis system. Hal tersebut digunakan dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah supaya hasil laporan keuangan yang dihasilkan bisa berkualitas karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit secara periodik untuk menilai kualitas dari laporan keuangan yang telah disusun.

Penilaian atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dilakukan oleh BPK setiap tahun dengan memberikan penilaian dalam bentuk opini yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Hal ini diperkuat dengan adanya fenomena di media masa beberapa bulan terakhir seperti dalam https://ponorogo.go.id yang Kabupaten Ponorogo berhasil menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memperoleh penghargaan "Wajar Tanpa Pengecualian" atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020. Penghargaan tersebut telah diraih oleh Kabupaten Ponorogo sebanyak sembilan kali berturut-turut. Namun demikian, dari hasil pemeriksaan tersebut BPK masih memberikan beberapa catatan di dalam laporan hasil pemeriksaan. Hal itu juga dipertegas oleh pernyataan dari Bupati Ponorogo bahwa akan cepat menindaklanjuti rekomendasi

yang diberikan oleh BPK tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo disini harus terus konsisten mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik lagi serta tidak boleh terlena dengan capaian yang diraih agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak mengalami penurunan opini ditahun berikutnya. (https://ponorogo.go.id diakses pada 16 Juli 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwasannya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan pemerintah daerah di eks karisidenan Madiun yang mampu mempertahankan opininya. Opini dari BPK tersebut dapat dipertahankan selama sembilan kali berturut-turut dimana lebih banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain yaitu, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi yang baru mampu menghasilkan opini WTP sebanyak delapan kali. Keberhasilan Kabupaten Ponorogo dalam mempertahankan opini tersebut tentu tidak bisa terlepas dari faktor yang menunjang dan mempengaruhinya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mengapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu penting untuk dilihat pengaruhnya.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu, kompetensi dari pegawai yang menyusunnya. Terbatasnya pegawai yang berkompetensi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menghambat penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Supaya bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah keuangan daerah dan bahkan organisasional tentang pemerintah (Ningrum, 2018).

Faktor kedua yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya (Wibowo, 2017:213). Pemerintah daerah yang memiliki komitmen organisasi tinggi, pemerintah tersebut tentu akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan pemerintah lebih transparan dan memiliki akuntabilitas.

Faktor ketiga yaitu penerapan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai (Haryanto, 2013). Sistem pengendalian intern merupakan faktor eksternal (*eksternal side*) yang dirancang untuk memudahkan pegawai mencapai tujuan organisasi. Sukirman, dkk. (2013), menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi mampu berinteraksi dengan kapasitas SDM dalam meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain ketiga faktor diatas terdapat satu faktor lagi yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasinya yaitu,

ketepatwaktuan (Andrianto, 2017). Hal tersebut juga di dukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mewajibkan pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penelitian terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak bahkan setiap tahun ada yang meneliti karena memang permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang beragam seperti pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Andrianto (2017), memberikan hasil penelitian bahwa variabel pertama kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Sleman. Variabel kedua pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Sleman. Variabel ketiga sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Sleman. Variabel keempat komitmen organisasi tidak dapat memperkuat ketiga variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Andrianto (2017) ini berbeda dengan penelitian ini. Faktor yang membedakan pada penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel moderasi dalam mencari pengaruh kualitas laporan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nugroho (2018) dengan hasil penelitian bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Boyolali. Penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2018) ini berbeda dengan penelitian ini. Faktor yang membedakan adalah dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan mengganti variabel kompetensi sumber daya manusia dengan variabel kompetensi pegawai.

Penelitian yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon dan Basid (2019) dengan hasil penelitian bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta. Variabel kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Tampubolon dan Basid (2019). Faktor yang membedakan pada penelitian ini terletak pada penambahan satu variabel yaitu sistem pengendalian intern. Alasan penambahan variabel sistem pengendalian intern dalam penelitian ini yaitu untuk melengkapi analisis atas kualitas laporan keuangan yang diterapkan di

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan pengaruhnya dengan variabel lain yang digunakan. Seperti diketahui bahwasannya Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sehingga perlu dilihat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern yang baik terhadap kualitas laporan keuangan yang menghasilkan opini dari BPK tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 2. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 4. Bagaimana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

5. Bagaimana pengaruh Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui :

- Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Pengaruh Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi, Sistem
 Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap
 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian:

1. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan referensi baru untuk peneliti selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo lebih khusus untuk SKPD supaya dapat terus meningkatkan kualitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan khususnya terkait dengan kompetensi pegawai, komitmen organisasi, sistem pengendalian itern, dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik khususnya terkait dengan kualitas laporan keuangan.

PONOROG